

# Ruang Lingkup Teori Politik

Dra. Riaty Raffiudin, M.A.



## PENDAHULUAN

---

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik oleh karena itu mahasiswa diharapkan sudah mengambil mata kuliah tersebut. Teori politik yang akan dibahas dalam modul ini adalah teori politik empiris yang diharapkan dapat digunakan mahasiswa untuk menganalisis fenomena-fenomena politik.

Pada Modul 1 ini kita akan membahas tentang “Ruang Lingkup Teori Politik”. Modul ini akan dibagi dalam dua kegiatan belajar yaitu:

1. Ruang Lingkup Teori Politik.
2. Konsep-konsep Teori Politik.

Secara umum setelah mempelajari Modul 1 ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang ruang lingkup teori politik. Sedangkan secara khusus mahasiswa diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan tentang bagaimana teori-teori politik tersebut terbentuk dan dapat berkembang seperti sekarang ini. Pemahaman ini penting karena pembentukan dan perkembangan teori politik tidak lepas dari argumentasi dan kritik yang dilontarkan oleh para akademisi terhadap teori yang mereka anggap kurang dapat menjelaskan fenomena-fenomena politik yang baru muncul.
- b. Membedakan antara teori politik yang empiris dengan filsafat dan ideologi politik.
- c. Menggunakan teori-teori politik ini untuk menganalisis fenomena-fenomena baru.
- d. Memberikan penilaian (*assessment*) dan kritik terhadap teori-teori politik.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Ruang Lingkup Teori Politik

☉ Dalam sebuah diskusi atau perdebatan, sering terdengar pembicara atau peserta aktif dikritik oleh peserta diskusi karena pembicara tersebut terlalu teoritis. Secara akal sehat, pernyataan ‘terlalu teoritis’ dapat diartikan sebagai ‘terlalu abstrak’ atau ‘terlalu mengawang-awang’ sehingga belum dapat menjelaskan fenomena atau fakta yang terjadi.

Terdapat beberapa konsep penting yang dapat ditarik dari pengamatan sederhana di paragraf di atas seperti ‘teoritis’, ‘abstrak’, ‘fenomena’ dan ‘fakta’. Keempat konsep ini merupakan ‘pintu masuk’ untuk mengerti tentang teori. Secara mudah, kita dapat mengatakan bahwa teori adalah sesuatu yang abstrak dan berbeda dari fenomena serta fakta yang konkret sifatnya.

Meskipun pengertian di atas sudah memberikan petunjuk yang benar tentang apa itu teori, tetapi pengertian tersebut belumlah lengkap mendefinisikan teori. Secara umum, teori dapatlah didefinisikan sebagai sebuah generalisasi yang abstrak tentang beberapa fenomena dan fakta.

### 1. Pengertian Teori Politik

Berkaitan erat dengan pendefinisian teori, sebenarnya teori memiliki sifat atau karakter yang sederhana (*parsimonous*) dan sistematis. Sifat dan karakter teori ini merupakan konsekuensi logis dari generalisasi dan abstraksi yang dituntut dari sebuah teori. Selain itu, kedua sifat dan karakter teori ini membantu kita dalam memberikan kesimpulan (Ian Craib 1984 diterj. Simamora 1986, h.15) dan pemahaman tentang fenomena dan fakta yang dijelaskan oleh teori tersebut. Teori Sistem David Easton dari pendekatan tingkah laku dan *Game Theory* dari pendekatan Pilihan Rasional memiliki karakteristik sederhana (*parsimoniuous*) dan sistematis.

Teori politik, menurut Miriam Budiardjo (2008, h. 43), adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain,

“Teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan d) kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.”

Mengapa teori politik diperlukan dalam ilmu politik? Paling tidak terdapat dua fungsi teori politik dalam ilmu politik. *Pertama*, sebagai dasar norma atau moral bagi perilaku politik termasuk bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. *Kedua*, sebagai alat analisis atau *tools of analysis* dari fenomena-fenomena politik yang sedang terjadi. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan kembali untuk membuat generalisasi-generalisasi baru.

Dua fungsi teori politik ini berkaitan erat dengan pengkategorian teori politik di dalam ilmu politik. Thomas P. Jenkin (1967) sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo (2008) dan Landman (2000) membedakan dua macam teori politik ke dalam *valuational theories* dan *empirical theories*, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak. Perbedaan kedua jenis teori tersebut didasarkan pada adanya nilai (*value*) yang terkandung dalam teori politik tersebut.

*Pertama, Valuational Theories.* Teori politik dalam kategori pertama adalah teori yang mendasarkan pada norma, moral, dan nilai sehingga dapat menentukan norma-norma untuk perilaku politik (*norms for political behavior*). Oleh karena adanya unsur norma-norma dan nilai ini, maka teori-teori ini dinamakan *valuational* (mengandung nilai). Filsafat politik dan ideologi politik termasuk dalam teori politik kategori pertama ini.

*Kedua, Empirical Theories.* Berbeda dengan teori politik kategori pertama, teori politik ini “membangun hubungan-hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep dalam usaha untuk menjelaskan terjadinya fenomena politik yang diamati.” (Landman 2000, h. 15). Apabila dikontraskan dengan jenis teori dalam kategori pertama, teori-teori kategori ini tidak terlalu mempersoalkan norma-norma. Teori dalam kategori ini biasanya menggunakan tahapan-tahapan seperti mendeskripsikan, mengklasifikasikan lalu mengomparasikan fenomena kehidupan politik untuk kemudian disistematiskan dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi. Miriam Budiardjo berpendapat teori empiris ini tidak mempersoalkan norma atau nilai, oleh karena itu teori-teori ini dapat dinamakan teori-teori yang bebas nilai (*value free*).

Sebagaimana disinggung di bagian pengantar, mata kuliah Teori Politik membatasi pada teori-teori politik empiris. Dengan perkataan lain, tidak membahas teori-teori politik yang sifatnya normatif seperti filsafat politik dan ideologi politik. Salah satu alasan membatasi pada teori politik empiris adalah berkaitan dengan fungsi dari teori politik. Pembahasan mengenai teori politik empiris diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk

mengaplikasikan teori politik untuk membahas fenomena-fenomena politik baru untuk kemudian memberi penilaian apakah teori-teori tersebut dapat menjadi *tools of analysis* yang tepat. Sebagaimana dikatakan oleh Ian Craib (1984 diterjemahkan Simamora 1986, h.15),

“Teori itu baru merupakan suatu bantuan kalau kita dapat mempelajari sesuatu yang baru daripadanya dan itu hanya mungkin kalau kita dapat menggunakannya.”

Teori-teori yang berlandaskan pada norma seperti filsafat dan ideologi politik tidak dibahas karena sedikit keterkaitan teori-teori ini dengan fenomena-fenomena politik.

Setelah membahas arti, sifat atau karakter dan fungsi dari teori politik, penting dibahas juga tentang pembentukan teori politik secara singkat. Teori politik dibentuk secara deduktif dan induktif. Teori politik yang dibentuk secara deduktif sampai pada kesimpulan-kesimpulan teori tersebut dengan menerapkan argumentasi atau alasan terhadap premis-premis yang diajukan. Sebagai contoh, Teori Pilihan Rasional mengasumsikan bahwa aktor-aktor politik memaksimalkan keuntungan pribadi atau kepentingan dirinya sendiri ketika melakukan pilihan dari alternatif-alternatif pilihan yang ada. Dari asumsi-asumsi dasar tersebut, ilmuwan politik mendeduksikan variasi dari hasil-hasil yang mungkin (Ward, 1995 & Levi 1997 sebagaimana dikutip Landman 2000).

Sedangkan teori politik yang dibentuk secara deduktif sampai pada kesimpulan-kesimpulan mereka melalui pengamatan terhadap fakta-fakta (Couvalis 1997 sebagaimana dikutip Landman, 2000). Sebagai contoh, seorang ilmuwan politik yang mengamati seringnya pemberontakan petani di daerah yang terdapat kesenjangan pemilikan tanah dan pendapatannya akan sampai pada kesimpulan bahwa kesenjangan mempunyai keterkaitan dengan terjadinya pemberontakan tersebut. Biasanya ilmuwan politik kemudian membandingkan bukti-bukti dari negara-negara atau wilayah-wilayah geografis lain untuk mengonfirmasi generalisasi ini.

## **2. Perbedaan antara Filsafat Politik, Teori Politik Empiris, dan Ideologi Politik**

Mahasiswa yang mempelajari Teori Politik sering menjadi bingung dengan cakupan teori politik yang berbeda-beda. Sebagaimana disinggung sebelumnya, pengategorian teori politik ke dalam teori yang berlandaskan

nilai (*valuational theories*) dan teori yang tidak berlandaskan nilai (*value-free theories* atau *empirical theories*) membuat cakupan Teori Politik menjadi sangat luas. Cakupan yang luas tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang mahasiswa mengerti perbedaan jenis teori dari dua kategori tersebut. Hal yang sering terjadi adalah mahasiswa menyamakan antara teori-teori empiris dengan filsafat ataupun ideologi politik. Penyamaan inilah yang harus dihindari karena pemahaman seperti itu tidak tepat. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengerti lebih jauh perbedaan antara filsafat politik (kadang-kadang disebut juga pemikiran politik), teori politik empiris dan ideologi politik.

#### a. Filsafat Politik

Secara harfiah filsafat diterjemahkan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan yang diperoleh dari perenungan atau kontemplasi untuk mencari kebenaran (Macridis 1983). Dalam ilmu politik, filsafat politik lebih diartikan sebagai sebuah cabang ilmu yang berusaha mencari penjelasan berdasarkan rasio tentang metafisika dan hakikat mendapatkan ilmu pengetahuan (epistemologi). Oleh karena itu, penjelasannya dicari melalui penjelasan hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta dengan hubungan antara sifat dan hakikat di dunia fana (Budiardjo 2008). Hasil dari proses berpikir ini digunakan sebagai dasar atau patokan nilai dalam kehidupan bernegara.

Salah satu filsuf Yunani yang terkenal adalah Plato. Plato menulis tentang *The Republic* sebuah negara ideal yang dipimpin oleh seorang *philosopher king* yang secara sengaja memisahkan diri dari hak milik dan ikatan keluarga supaya dapat memerintah untuk mencapai kepentingan bersama. Salah satu pemikiran Plato yang banyak dikutip orang adalah tentang keadilan. Menurutnya keadilan merupakan hakikat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik seperti yang dicita-citakan. Oleh karena itu untuk dapat menanggulangi masalah ketidakadilan dan persoalan-persoalan politik lainnya di dunia fana, manusia haruslah memecahkan terlebih dahulu persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta.

Selanjutnya mengenai pembagian dalam filsafat politik, Magnis-Suseno, berbeda dengan Miriam Budiardjo dalam menetapkan pembagian tersebut. Menurut Magnis-Suseno (1983, h.12) filsafat terbagi menjadi dua cabang utama yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis (etika). Filsafat teoritis

mempertanyakan “apa yang ada” seperti mempertanyakan hakikat manusia, hakikat alam, hakikat realitas sebagai keseluruhan, hakikat pengetahuan ataupun hakikat Yang Transenden (Magnis-Suseno 1983, h. 12). Sedangkan filsafat praktis atau etika mempertanyakan “apa yang mesti manusia lakukan terhadap yang ada itu”. Dengan begitu, filsafat praktis atau etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia (Magnis-Suseno 1983, h. 13).

Berbeda dengan Magnis-Suseno, Miriam Budiardjo (2008) yang mengutip Jenkin (1967) tidak membagi filsafat ke dalam kedua kelompok tersebut. Menurut Budiardjo, filsafat politik dilanjutkan dengan apa yang disebut teori politik yang sistemis (*systemic political theory*). Sebagaimana dikatakan oleh Budiardjo (2008), teori politik yang sistemis ini tidak memajukan pandangan sendiri tentang metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Dengan perkataan lain, teori politik sistematis ini tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi mencoba mewujudkan norma-norma itu ke dalam suatu program politik.

Teori-teori politik semacam ini merupakan langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menetapkan norma-norma (tanpa mempertanyakan asal-muasal norma tersebut) dalam kegiatan politik. Sebagai contoh pada abad ke-19 teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan adanya sistem hukum serta sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu. Pembahasan teori-teori politik itu mendasarkan pandangan mengenai adanya hukum alam – sebuah pandangan yang sudah lazim pada saat itu. Hanya saja, teori-teori politik itu tidak lagi mempersoalkan lagi hukum alam tersebut.

#### *b. Teori Politik Empiris*

Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca pada Kegiatan Belajar 2 Modul 1. Secara singkat teori politik empiris adalah generalisasi-generalisasi yang terdiri dari hubungan antar konsep yang memiliki hubungan sebab akibat ataupun hubungan antar konsep non kausalitas yang tujuannya untuk menjelaskan fenomena-fenomena politik.

c. *Ideologi Politik*

Ideologi politik didefinisikan oleh Miriam Budiardjo adalah sebagai (2008):

“himpunan nilai, ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya”.

Ideologi politik yang berisi nilai-nilai dan ide-ide membingkai cara berpikir dan perilaku politik seseorang yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi (Macridis 1983, h. 4).

Sumber dari ideologi politik, tidak lain dan tidak bukan adalah filsafat politik dan teori politik. Masyarakat yang telah percaya terhadap nilai-nilai atau ide-ide tertentu memaksakan teori politik atau pun filsafat politik yang mengandung nilai-nilai tersebut untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat tersebut. Sering kali ideologi politik yang terbentuk memiliki bentuk yang sangat sederhana, kadang-kadang terdistorsi dari sumber-sumbernya.

Diakui oleh Macridis bahwa sangat sulit untuk dimengerti kapan dan dalam lingkungan apa sebuah teori politik atau pun filsafat politik mentransformasi menjadi sebuah ideologi politik. Dengan perkataan lain, adalah tidak mudah menjelaskan kapan transformasi dari teori atau filsafat politik terjadi dan menjadi sebuah dasar bagi gerakan yang berorientasi pada tindakan (*action-oriented movement*). Selanjutnya Macridis menjelaskan bahwa ideologi politik memiliki beberapa fungsi (Macridis 1983, h. 9-13). Secara umum, ideologi politik sebagai seperangkat ide dan kepercayaan yang dianut oleh sejumlah orang atau kelompok masyarakat ini menentukan apa yang bernilai apa yang tidak, apa yang dijaga keberlangsungannya apa yang harus dirubah, tentu saja membentuk pemikiran perilaku serta tindakan-tindakan politik dari kelompok masyarakat yang menganut ideologi politik tersebut. Dengan perkataan, ideologi selain memprovokasi, ia juga memberikan kerangka kerja yang mendasar bagi tindakan-tindakan politik tersebut.

Secara lebih khusus, ideologi politik memiliki fungsi-fungsi seperti (1) memberikan legitimasi, (2) sarana memobilisasi dan membentuk solidaritas, (3) Memperlihatkan pentingnya pimpinan untuk memanipulasi pesan-pesan yang ingin disampaikan, (3) sarana untuk berkomunikasi dan berekspresi, dan (4) sebagai landasan bagi tindakan politik. Fungsi-fungsi ideologi politik ini tergambarkan dengan baik oleh Hitler ketika ia menjabat sebagai *Chancellor of Germany* (pimpinan Jerman) dan mempropagandakan Nazi sebagai ideologi terbaik bagi rakyat Jerman (Macridis 1983, h. 172-198).

Selain memiliki fungsi, ideologi politik dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan:

1. Ideologi yang mempertahankan *status quo*  
Ideologi yang mempertahankan dan merasionalisasikan keteraturan-keteraturan ekonomi, sosial, dan politik dalam waktu tertentu dan dalam masyarakat apa pun.  
Contoh: Liberalisme, Komunisme di (bekas negara) Uni Soviet.
2. Ideologi radikal atau ideologi yang revolusioner  
Ideologi ini mengadvokasi perubahan-perubahan yang menyeluruh dan secara intensif serta revolusioner.  
Contoh: Marxisme, Fasisme.
3. Ideologi reformis  
Ideologi reformis ini mengadvokasikan perubahan-perubahan secara bertahap.  
Contoh: Developmentalisme.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat sederhana (*parsimonious*) dan sistematis dari sebuah teori!
- 2) Jelaskan pengertian teori politik menurut Miriam Budiardjo!
- 3) Jelaskan apa yang dimaksud dengan cara berpikir induktif dalam pembentukan teori!



- 4) Jelaskan perbedaan antara ideologi politik dari filsafat politik dan teori politik empiris!
- 5) Jelaskan kegunaan ideologi politik!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Sederhana (*parsimonious*) dan sistematis adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh sebuah teori. Yang dimaksud dengan sederhana adalah formulasi dari generalisasi-generalisasi mampu memotret kompleksitas fenomena-fenomena serta mampu memformulasikannya dalam pernyataan yang sederhana di dalam hubungan antara konsep-konsepnya. Teori dapat diformulasikan dalam pernyataan yang sederhana karena kemampuannya untuk mengatur secara terorganisir proposisi-proposisinya. Biasanya kesederhanaan dan sistematisasi dari teori ini terlihat dalam model yang ditawarkan oleh teori politik tersebut. Contoh: Teori Sistem Politik dari David Easton.
- 2) Teori politik menurut Miriam Budiardjo “Teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan d) kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.”
- 3) Teori politik yang dibentuk secara induktif sampai pada kesimpulan-kesimpulan teori tersebut dengan menerapkan argumentasi atau alasan terhadap premis-premis yang diajukan.
- 4) Hal yang membedakan ideologi politik dari filsafat politik dan teori politik empiris adalah kemampuan ideologi untuk membuat sekelompok masyarakat bergerak melakukan tindakan politik sebagaimana diindoktrinasikan di dalam ideologi politik tersebut.
- 5) Secara umum, ideologi politik berfungsi untuk membentuk pemikiran perilaku serta tindakan-tindakan politik dari kelompok masyarakat yang menganut ideologi politik tersebut. Dengan perkataan lain ideologi selain memprovokasi, juga memberikan kerangka kerja yang mendasar bagi tindakan-tindakan politik tersebut. Secara lebih khusus, ideologi politik memiliki fungsi-fungsi seperti: (1) memberikan legitimasi, (2) sarana memobilisasi dan membentuk solidaritas, (3) Memperlihatkan pentingnya pimpinan untuk memanipulasi pesan-pesan yang ingin

disampaikan, (4) sarana untuk berkomunikasi dan berekspresi, serta (5) sebagai landasan bagi tindakan politik.



## RANGKUMAN

---

- ✚ Teori politik, sebagaimana layaknya sebuah teori, memiliki sifat atau karakter yang sederhana (*parsimonous*) dan sistematis.
- ✚ Teori politik terdiri dari *valuational theories* dan *empirical theories*.
- ✚ Pembentukan teori politik yang empiris dapat menggunakan cara deduktif maupun induktif.
- ✚ Filsafat politik, teori politik empiris, dan ideologi politik merupakan jenis-jenis dari teori politik.
- ✚ Hal yang membedakan teori politik empiris dengan filsafat dan ideologi politik adalah masalah nilai. Filsafat dan ideologi politik adalah teori politik yang sarat nilai, oleh karena itu terutama filsafat politik biasa digunakan sebagai dasar norma dalam berperilaku ataupun kehidupan bernegara. Sedangkan teori politik empiris tidak sarat nilai tetapi mendasarkan diri pada fakta-fakta yang dapat diamati untuk kemudian membuat generalisasi-generalisasi.
- ✚ Hal yang membedakan ideologi politik dengan filsafat politik dan teori politik empiris adalah kemampuan ideologi untuk memprovokasi nilai-nilai dalam ideologi tersebut untuk mempengaruhi kelompok masyarakat untuk melakukan tindakan politik berdasarkan nilai-nilai tersebut.



## TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Perbedaan antara teori politik ke dalam *valuational theories* dan *empirical theories* didasarkan pada unsur ....
  - A. kepentingan
  - B. nilai
  - C. kekuasaan
  - D. sikap
  
- 2) Adolf Hitler mengagitasi masyarakat Jerman untuk mempercayai bahwa Ras Aria merupakan ras yang tertinggi di dunia. Usaha yang dilakukan oleh Hitler ini adalah usahanya untuk menyebarkan ....
  - A. filsafat politik

- B. teori politik
  - C. ideologi politik
  - D. norma politik
- 3) Cara berpikir induktif dan deduktif sangat berperan dalam pembentukan teori. Bila cara berpikir sampai pada kesimpulan-kesimpulan teori dengan menerapkan argumentasi atau alasan terhadap premis-premis yang diajukan, ilmuwan politik tersebut menggunakan cara berpikir ....
- A. deduktif
  - B. induktif
  - C. metodologis
  - D. kausalitas
- 4) Seorang mahasiswa menggunakan teori sistem politik David Easton untuk membandingkan dua sistem politik yaitu sistem politik Thailand dan Burma untuk melihat sistem politik manakah yang lebih demokratis. Kegiatan yang sedang dilakukan oleh mahasiswa tersebut adalah membuat ....
- A. generalisasi terhadap fenomena-fenomena demokratisasi di Thailand dan Burma
  - B. hipotesis bahwa sistem politik Thailand lebih demokratis dari sistem politik Burma
  - C. menentukan variabel-variabel apa saja yang diperlukan untuk membuat generalisasi
  - D. analisis terhadap institusi-institusi politik yang mendukung demokratisasi
- 5) Pernyataan berikut ini yang **tidak tepat** tentang filsafat, ideologi dan teori politik adalah....
- A. sumber dari ideologi politik, tidak lain dan tidak bukan, adalah filsafat politik dan teori politik
  - B. sangat mudah untuk mengerti kapan dan dalam lingkungan apa yang dapat mentransformasi sebuah teori politik atau pun filsafat politik menjadi sebuah ideologi politik
  - C. para ideolog mampu memaksakan teori politik atau pun filsafat politik untuk diterapkan dalam masyarakat dan menjadikan landasan untuk melakukan gerakan yang berorientasi tindakan (*action-oriented movement*)
  - D. filsafat politik biasanya digunakan untuk menjadi dasar norma dalam berperilaku ataupun kehidupan bernegara

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Konsep-konsep Teori Politik

Ⓟ Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas “Ruang Lingkup Teori Politik”. Sekarang kita menginjak kepada pembahasan tentang “Konsep-konsep Teori Politik”. Bagian ini merupakan bagian yang sangat menantang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa. Menantang bagi penulis karena penulis berusaha untuk menjelaskan pembentukan teori secara sangat sederhana. Bagian lain yang menantang bagi penulis adalah mengajak mahasiswa bukan hanya untuk dapat memahami teori-teori politik yang akan kita bahas ini, lebih penting lagi bagi mahasiswa agar berani menggunakan teori-teori tersebut untuk menganalisis fenomena-fenomena politik yang mereka kaji sekaligus memberikan kritik dan penilaian terhadap kemampuan teori tersebut sebagai *tools of analysis*. Menurut penulis, bagian terakhir inilah merupakan bagian yang paling menantang bagi mahasiswa. Perlu digarisbawahi bahwa, teori-teori politik semapan apa pun harus siap untuk dikritik untuk dilengkapi atau untuk dinegasikan sama sekali. Selain para ilmuwan politik, mahasiswa sebagai calon akademisi berperan penting dalam proses pembentukan teori politik tersebut.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa pembentukan teori-teori politik secara deduktif dan induktif ini berkaitan erat dengan metode yang digunakan, kuantitatif ataupun kualitatif. Sering dikatakan bahwa teori politik yang dibentuk secara induktif dengan menggunakan metode kualitatif tidaklah sebaik teori politik yang dibentuk secara deduktif dengan menggunakan kedua cara berpikir dan kedua metode -metode kuantitatif. Pernyataan di atas sama sekali tidak tepat karena kedua cara berpikir dan kedua metode tersebut sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan teori-teori politik.

Setelah mempelajari konsep-konsep teori politik, secara khusus mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan dan menggunakan atribut-atribut teori politik seperti konsep variabel, hipotesis, inferensi, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pemahaman ini penting agar mahasiswa mendapat bingkai pemahaman yang sama dalam memahami dan menggunakan teori-teori politik yang dipelajarinya.

2. Menjelaskan dan menggunakan konsep-konsep yang membentuk teori-teori politik yang akan diperdalam pada mata kuliah ini. Konsep-konsep itu mencakup antara lain kekuasaan, wewenang dan legitimasi, negara, kelas, elit, pilihan-pilihan rasional, modernisasi, pembangunan, ketergantungan, *civil society*, gerakan sosial baru, feminisme, transisi demokrasi, representasi dan demokrasi.
3. Menjelaskan pembentukan teori empiris dengan konsep-konsep atau variabel-variabelnya yang berhubungan sebab akibat (*causal empirical theories*).
4. Menjelaskan pembentukan teori empiris yang konsep-konsepnya berhubungan tetapi bukan dalam hubungan sebab akibat (*non-causal empirical theories*).
5. Menjelaskan peran penelitian dan kritik Akademisi dalam pembentukan teori.

Berikut akan diuraikan secara lebih lengkap.

### 1. Atribut-atribut Pembentuk Teori Politik

Konsep merupakan komponen terpenting untuk dapat memahami teori politik. Konsep itu sendiri memiliki keabstrakan yang bertingkat-tingkat. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ‘kursi’, ‘pohon’ atau ‘mobil’. Ketiga benda tersebut dinamakan seperti yang kita sebut sekarang setelah kita membuat abstraksi terhadap ketiga benda tersebut. Ketiga konsep tersebut akan kita rasakan perbedaannya apabila kita menyebut konsep ‘masyarakat’, ‘gerakan sosial’ ataupun ‘demokrasi’. Selain kita tahu bahwa kelompok konsep yang pertama lebih konkret daripada kelompok konsep yang kedua, kita juga dapat merasakan perbedaan tingkatan dari kedua kelompok konsep tersebut.

Miriam Budiardjo (2008) menjelaskan arti konsep dengan sangat tepat yaitu:

“unsur yang penting dalam usaha kita untuk “mengerti” dunia sekelilingnya. “Mengerti” itu hanya dapat dicapai melalui pikiran (*mind*) kita. Konsep adalah konstruksi mental, suatu ide yang abstrak, yang menunjuk pada beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik, yang dimiliki oleh fenomena itu. Jadi, konsep adalah abstraksi dari atau mencerminkan persepsi-persepsi mengenai realitas. Atas dasar konsep atau seperangkat konsep dapat disusun atau dirumuskan generalisasi. Biasanya konsep dirumuskan dalam satu atau dua kata.”

Variabel adalah konsep yang memiliki nilai karena itu dapat diukur. Pendapatan individu atau tingkat demokratisasi sebuah negara adalah contoh dari variabel. Peneliti yang menggunakan variabel pendapatan individu dapat mengukur dengan menggunakan indikator seperti pendapatan tetap per bulan. Tingkat demokrasi sebuah negara dapat diukur dengan indikator seperti variasi institusi demokrasi (partai politik, kelompok kepentingan) yang ada di suatu negara dan tinggi/rendahnya partisipasi politik di negara tersebut.

Terdapat beberapa jenis variabel antara lain terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*), variabel bebas (*independent variable*), variabel yang mendahului (*antecedent variable*) dan *intervening variable*. Dalam sebuah penelitian tentang desain kelembagaan dan kinerja demokrasi dapat diasumsikan bahwa desain kelembagaan menjadi variabel bebas karena menentukan kinerja dari demokrasi (dalam hal ini kinerja demokrasi bertindak variabel terikat). Di samping kedua variabel yang saling mempunyai hubungan sebab akibat tersebut, terdapat variabel yang tidak secara langsung tetapi diperlukan untuk menjelaskan hubungan dua atau lebih variabel. Variabel jenis ini disebut sebagai *intervening variable*. Contoh: korelasi yang positif antara pendapatan individu dan tingkat kesehatan seseorang dijelaskan dengan adanya pengeluaran asuransi kesehatan sebagai *intervening variable*.

Hipotesis adalah sebuah pernyataan tentang hubungan yang mungkin ditimbulkan antara dua atau lebih variabel yang diturunkan dari teori yang kemudian hipotesis ini di tes di lapangan. Hipotesa biasanya dalam bentuk “jika A maka B” atau “ketidakmampuan pemerintah dalam menekan harga BBM mempengaruhi terjadinya peningkatan unjuk rasa dalam masyarakat”.

Metode penelitian adalah teknik atau alat untuk mengumpulkan data. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik dan kualitas dari objek-objek politik yang sedang diteliti. Metode kualitatif menggunakan cara membandingkan sejarah, pengamatan terlibat, dan wawancara mendalam dalam melakukan penelitian lapangan.

Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan indikator-indikator kuantitatif dari fenomena politik yang kemudian berusaha untuk membangun hubungan-hubungan antara variabel-variabel dari periode yang berbeda ataupun dari negara yang berbeda. Metode kuantitatif menggunakan *survey* dengan kuesioner dan pengamatan berstruktur dalam pencarian datanya. Pengolahan data biasanya menggunakan program-program statistik tertentu misalnya *Statistical Package of Social Sciences* (SPSS).

Inferensi tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah proses yang terus menerus dilakukan ilmuwan politik untuk membuat pernyataan tentang sesuatu yang mereka tidak tahu dengan menggunakan fakta-fakta yang mereka tahu tentang dunia ini. Inferensi-inferensi ini secara berkesinambungan dilakukan dalam usaha untuk pembentukan teori politik. Inferensi-inferensi terus dilakukan ketika ilmuwan politik mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menguji hipotesis, dan membuat prediksi.

Dengan melakukan inferensi-inferensi secara berkesinambungan ini maka ilmuwan politik mampu mencapai generalisasi yang paling tinggi derajatnya yaitu teori politik. Salah satu contoh teori politik adalah *Underdevelopment Theory* dari Dos Santos yang masih relevan hingga sekarang. Salah satu generalisasi yang Santos dapatkan adalah bahwa keterbelakangan di negara-negara satelit terjadi justru karena negara-negara ini bergabung dengan sistem ekonomi internasional atau kapitalisme.

## **2. Konsep-konsep yang Membentuk Teori Politik**

Pengenalan secara singkat mengenai konsep-konsep sangat penting agar mahasiswa dapat mendalami di sepanjang pembelajaran ini. Adapun konsep-konsep yang akan dibahas mencakup antara lain kekuasaan, otoritas dan legitimasi; negara, kelas, dan elit; pilihan-pilihan rasional; modernisasi, pembangunan, dan ketergantungan; *civil society*, gerakan sosial baru, dan feminisme; transisi demokrasi, representasi dan demokrasi. Konsep-konsep ini merupakan konsep yang membentuk teori-teori politik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini.

### **Kekuasaan, Otoritas, dan Legitimasi**

#### *Kekuasaan*

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk membuat tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pemilik kekuasaan. Dengan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa inti atau substansi dari kekuasaan itu sendiri adalah hak untuk meminta atau bahkan memaksa orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang berkuasa.



### *Otoritas*

Kekuasaan tidak hanya memiliki ‘kemampuan’ agar orang yang dikuasai memenuhi keinginan yang berkuasa, namun juga disertai ‘hak’ untuk melakukan hal tersebut, itulah otoritas atau kewenangan. Ini yang membedakan antara kekuasaan dengan wewenang, yakni adanya ‘hak’ yang diakui.

### *Legitimasi*

Legitimasi didefinisikan sebagai wewenang yang tidak saja dianggap sah secara hukum, namun juga mendapat pengakuan dan dukungan kepercayaan dari rakyat. Dari definisi ini berarti cakupan wilayah dari legitimasi lebih luas, dalam arti pihak yang dikuasai lebih besar lagi dibandingkan dengan kekuasaan atau wewenang. Legitimasi lebih sering diacukan kepada eksistensi sebuah pemerintahan.

## **Negara, Kelas, dan Elit**

### *Negara*

Konsep negara dapat dikatakan sebagai konsep tertua karena telah menjadi fokus penelitian ilmu politik sejak ilmu politik ini ada. Sebelum Perang Dunia I, negara menjadi pusat kajian ilmu politik; karena itu lah maka pendekatan pada masa itu disebut sebagai pendekatan kelembagaan.

Negara didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk mengendalikan masyarakat. Wewenang dan kekuasaan tertinggi dijalankan oleh sejumlah pejabat ini biasanya diselenggarakan atas dasar hukum. Negara, selain mampu menuntut ketaatan warga negaranya untuk mematuhi dasar hukum yang berlaku juga memiliki kekuasaan memaksa sebagai pemegang monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah di dalam wilayah negara tersebut.

### *Kelas*

Pemikiran-pemikiran Marx tentang kelas menjadi awal dari pengonstruksian masyarakat dalam dua kategori: kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Posisi dominan dari kelas berkuasa ini didasarkan pada dominasi pemilikan alat-alat produksi. Konflik antara kelas yang berkuasa dengan kelas yang dikuasai terjadi secara terus menerus mengikuti dialektika materialisme sejarah. Garis konflik kelas ditarik secara paling tegas dalam

masyarakat kapitalis modern, karena dalam masyarakat semacam itu pemisahan kepentingan-kepentingan ekonomi terlihat paling nyata mengingat adanya polarisasi antara pemusatan kekayaan yang luar biasa pada satu sisi dan pemusatan kemiskinan pada sisi yang lain. Dialektika tertinggi Marx menghasilkan masyarakat tanpa kelas di mana kelas kapitalis dikalahkan oleh kelas pekerja yang kemudian diikuti dengan terbentuknya masyarakat tanpa kelas.

### *Elit*

Konsep dan teori elit muncul sebagai reaksi dari teori Marx. Para teoritis elit ini berargumentasi bahwa dalam baik dalam masyarakat otoriter ataupun demokratis selalu terdapat suatu kelompok kecil yang berkuasa atas massa rakyat. Dengan begitu, selalu ada unsur oligarki dalam kepemimpinan masyarakat. Kelompok kecil ini dinamakan “elit” dan merupakan minoritas kecil yang kohesif dan menjadi pimpinan bagi massa (kelompok masyarakat di luar kelompok elit yang tidak terorganisir dan apatis).

Sumber dari kekuasaan elit tidak terlalu menjadi pusat perhatian di awal perkembangan teori elit ini (awal abad ke-20). Namun di tahun 1960-an, teori elit diperluas dengan munculnya konsep “elit strategis” yang dikembangkan oleh Suzanne Keller (1963). Pengembangan konsep ini mengarah pada pengkhususan dari elit-elit di mana di tiap bidang, seperti politik, ekonomi, keilmuan, militer, budaya memiliki elit-elit khususnya tersendiri. Namun secara kolektif, elit-elit ini, di dalam masyarakat, dinamakan *ruling-class*.

### **Pilihan Rasional**

Asumsi dasar dari Teori Pilihan Rasional adalah bahwa pelaku yang melakukan pilihan rasional berdasarkan tindakan-tindakan rasional yang secara sengaja ia lakukan untuk memaksimalkan keuntungannya. Siapakah aktor-aktor tersebut? Para pelaku tindakan rasional ini adalah politisi, birokrat, pemilih (dalam berbagai acara pemilihan) dan aktor ekonomi. Mereka pada dasarnya hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri karena itu mereka selalu mencari cara agar dapat mengoptimalkan kepentingan mereka dengan cara seefisien mungkin.

## **Modernisasi, Pembangunan, dan Ketergantungan**

### *Modernisasi*

Pengertian modernisasi dikaitkan dengan persepsi kemajuan dan digunakan dalam perbandingan antara negara miskin yang biasanya adalah (negara pertanian) dan negara kaya (negara industri).

### *Pembangunan Politik*

Pembangunan politik ditekankan pada penguatan nilai-nilai dan praktek-praktek demokrasi kapitalis negara-negara Barat seperti: partisipasi politik, praktek multipartai tetapi haruslah menunjang pembangunan ekonomi. Dari penelitian-penelitian empiris yang dilakukan oleh Lipset memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi dan legitimasi politik di mana pembangunan ekonomi memfasilitasi pembentukan dan keberlangsungan demokrasi (Lipset 1959). Lucian Pye (1965 dan 1966) berargumen sebaliknya di mana demokrasi yang memfasilitasi pembangunan ekonomi.

### *Konsep Ketergantungan*

Kemiskinan yang dialami negara-negara pertanian Dunia III adalah akibat struktur perekonomian dunia yang eksploitatif sehingga surplus dari negara-negara ini beralih ke negara-negara industri maju. Perdagangan dunia yang bebas merupakan arena di mana eksploitasi ini terjadi.

Berpangkal pada materialisme yang dikembangkan Karl Marx, teori-teori dalam kelompok ini menyangkal tesis Marx bahwa kapitalisme akan menjadi produksi tunggal, menciptakan proses maupun struktur masyarakat yang sama di semua negara di dunia ini.

Kapitalisme yang berkembang di negara-negara yang menjadi korban imperialisme tidak sama dengan perkembangan kapitalisme di negara imperialis yang menyentuhnya. Kapitalisme di periferi (pinggiran) merupakan kapitalisme yang sakit yang sulit berkembang, oleh karena itu dinamikanya pun juga berlainan.

***Civil Society, Gerakan Sosial Baru, dan Feminisme*** (disarikan dari Budiardjo 2008, h. 382-386)

Gerakan Sosial Baru merupakan bentuk perilaku kolektif yang berakar dalam kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Gerakan ini bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya. Untuk mencapai tujuannya, gerakan ini mendirikan berbagai kelompok yang memperdulikan masalah-masalah baru seperti lingkungan, gerakan perempuan, hak asasi manusia dan gerakan anti-nuklir. Di antara kelompok kepentingan itu ada yang bersifat sosial (seperti menyediakan air bersih), ada yang lebih bersifat advokasi (seperti penegakan hak asasi).

Para aktivis gerakan ini sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat, dan merasa “terasingkan” (*alienasi*) dari masyarakat. Untuk skala nasional, para aktivis gerakan ini menginginkan desentralisasi dari kekuasaan negara, desentralisasi pemerintah, partisipasi dalam peningkatan swadaya (*self help*) masyarakat, terutama masyarakat lokal.

Sementara itu kelompok-kelompok ini terus menerus berinteraksi dengan badan eksekutif, dengan tetap memperhatikan kedudukan “otonom”nya terhadap negara (maka sering dinamakan *Non-Governmental Organizations* atau NGO). Juga dibina interaksi dengan unsur-unsur kemasyarakatan lainnya termasuk dunia ekonomi dan industri.

### *Transisi Demokrasi*

Kebanyakan dari negara-negara Dunia III telah mengubah rancangan desain kelembagaannya dari sistem yang otoriter ke arah sistem yang demokratis. Tahap yang krusial dalam transisi ini pengonsolidasian sistem yang demokratis tersebut. Banyak aspek yang dapat berkontribusi dalam tahap ini antara lain peningkatan kondisi perekonomian yang menumbuhkan kelas menengah baru, perkembangan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi di kalangan masyarakat pada umumnya serta *good will* dari elit yang berkuasa.

### *Demokrasi dan representasi*

Selain konsep negara, konsep demokrasi merupakan konsep yang juga sudah ada sejak ilmu politik ada. Sejak abad ke-19 perkembangan demokrasi konstitusional telah bergeser, dari penerapan *rule of law* yang

*rigid* sampai menjadi penanggung jawab bagi terselenggaranya *welfare state* di abad ke-20.

Demokrasi konstitusional abad ke-21 ini memperluas cakupannya untuk meningkatkan representasi dalam sebuah sistem demokratis. Untuk itu di samping diperlukan pemerintah, parlemen dan lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel, *concern* dari penelitian-penelitian tentang bagaimana meningkatkan kualitas sistem representasi: mulai dari sistem kepartaian, sistem elektoral dan keterwakilan baik dari kelompok-kelompok atau unsur *civil society* lainnya termasuk media massa untuk pengawasan terhadap sistem representasi ini.

### 3. *Causal Empirical Theories: Pembentukan dan Contoh-contoh*

Ilmu politik dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan karena kemampuannya untuk:

- a. membandingkan dengan deskripsi, klasifikasi, tes hipotesis dan prediksi
- b. memperbandingkan ini juga mengindikasikan kemampuan untuk menjelaskan, membentuk teori, dan prediksi.
- c. menggunakan metode ilmiah yang diadopsi dari ilmu alam misalnya mengumpulkan data secara sistematis, mencari pola-pola yang nyata dalam data dan memformulasikan teori untuk menjelaskan pola-pola tersebut.

Sejak awal penelitian terhadap sebuah fenomena dilakukan, peneliti memulai dengan sebuah teori di mana dari teori tersebut diformulasikan permasalahan dan pertanyaan penelitian tersebut. Setelah itu, formulasi permasalahan dan pertanyaan penelitian tersebut diturunkan ke dalam variabel-variabel yang berhubungan secara sebab-akibat. Proses selanjutnya adalah memformulasikan dalam bentuk hipotesis untuk di tes dengan data empiris di lapangan. Cara penurunan dari sebuah teori menjadi permasalahan dan pertanyaan penelitian, variabel-variabel, hipotesis lalu di tes di lapangan merupakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir yang deduktif ini biasanya dikombinasikan dengan metode penelitian kuantitatif, di mana data akan dianalisis dengan bantuan statistik. Hasil dari perhitungan statistik tersebut kemudian diabstraksikan kembali kepada kerangka teori awal untuk menjawab apakah penurunan teori ke permasalahan dan pertanyaan penelitian tepat atau sebaliknya. Dengan kata lain, verifikasi dilakukan dengan perhitungan-perhitungan statistik. Data lapangan pun dideskripsikan

secara kontekstual, klasifikasi, di tes hipotesis dan dijadikan landasan untuk membuat prediksi.

**Deskripsi** ini bertujuan untuk menceritakan apa yang terjadi (*telling the story*) tetapi tidak untuk membuat inferensi yang lebih luas. Macauley dalam bukunya *Sandino's Affair* mendeskripsikan kampanye Augusto Sandino di Nikaragua tahun 1967 untuk mengusir tentara marinir Amerika Serikat dari Nikaragua. Kampanye ini dilakukannya ketika terjadi krisis suksesi kepresidenan di Nikaragua terjadi. Meskipun akhirnya Sandino tewas di tangan tentara marinir AS, namun pendeskripsian oleh penulis tersebut sangat detil dan kaya akan informasi sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang terjadi (disadur dari Landman 2000).

**Klasifikasi** adalah komponen yang diperlukan untuk sebuah perbandingan yang sistematis. Klasifikasi memperlihatkan tingkat perbandingan yang lebih tinggi dibandingkan deskripsi kontekstual karena mengelompokkan negara-negara, sistem-sistem politik, kejadian-kejadian ke dalam kategori yang mempunyai karakteristik-karakteristik yang sama. Klasifikasi yang baik haruslah memiliki kategori-kategori yang terdefinisi dengan baik sehingga mampu mengorganisir fakta-fakta empiris.

Aristoteles melakukan klasifikasi dengan membagi negara ke dalam 6 tipe negara yang mendasarkan pada kombinasi bentuk dari peraturan dengan jumlah pemimpin.

**Bagan 1.1. Klasifikasi Negara Aristoteles**

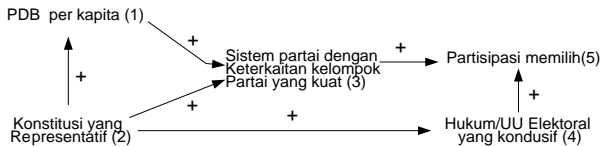
		Jumlah Pemimpin		
		Satu	Beberapa	Banyak
Baik	Monarki	Aristokrasi	<i>Polity</i>	
	Tirani	Oligarki	Demokrasi	
Korup				

Sumber: Landman 2000, Bagan 1.1 h.7

Melakukan **tes hipotesis** merupakan usaha untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hal-hal yang telah dideskripsikan dan diklasifikasikan. Ilmuwan politik berangkat dari teori tertentu, menurunkan hipotesis (dalam hubungan antarvariabel) dan mengujinya dengan data

empiris. Usaha ini dimaksudkan untuk membangun teori-teori dalam ilmu politik secara lebih komprehensif.

Bagan 1.2. Hipotesis kunci Partisipasi Memilih Powell (1982)



Powell (1982) dalam bukunya *Contemporary Democracies* sebagaimana dikutip oleh Landman (2000) meneliti sejumlah hipotesis kunci yang berkaitan dengan partisipasi memilih di 29 negara demokratis. Partisipasi diukur dengan menggunakan *voter turnout* atau prosentase dari yang harusnya dapat memilih dibagi dengan mereka yang datang ke tempat pemilihan dalam sebuah pemilihan tingkat nasional. Powell berpendapat bahwa partisipasi pemilih seharusnya lebih tinggi di negara-negara yang memiliki: (1) tingkat pembangunan ekonomi lebih tinggi (PDB per kapita), (2) konstitusi yang representatif, Undang-undang pemilu yang memfasilitasi pemilih dan sistem partai yang memiliki keterkaitan dengan kelompok-kelompok di masyarakat (Powell 1982 sebagaimana dikutip oleh Landman 2000, h. 9). Analisa statistik dari ke-29 negara ini menunjukkan pengaruh yang positif dari ke seluruh variabel tersebut terhadap partisipasi pemilih seperti terlihat dalam gambar di atas.

Selanjutnya, Ilmuwan politik membuat **prediksi** tentang *political outcomes* di masa mendatang berdasarkan generalisasi setelah melewati tahap-tahap deskripsi, klasifikasi dan pen-tesan hipotesis. Biasanya prediksi itu dalam bentuk pernyataan yang sifatnya *probabilistic* seperti “negara yang memiliki sistem representasi proporsional cenderung memiliki banyak partai politik”. Contoh: Rueschmeyer *et. al.* (1992) membandingkan pengalaman-pengalaman sejarah dari negara-negara industri maju dengan negara-negara berkembang untuk menjelaskan hubungan antara perkembangan kapitalis (*capitalist development*) dan demokrasi.

**4. Non-causal Empirical Theories: Pembentukan dan contoh-contoh**

Pembentukan teori empiris yang konsep-konsepnya berhubungan tetapi bukan dalam hubungan sebab akibat (*non-causal empirical theories*) yang

terbentuk secara induktif juga berkontribusi dalam pembentukan teori. Tahapan-tahapan seperti melakukan deskripsi dan klasifikasi juga dijalankan. Dua tahap lainnya seperti men-tes hipotesis dan membuat prediksi tidak sepenuhnya dilakukan karena bukan tujuan dari teori jenis ini untuk melakukan kedua hal tersebut.

Peneliti yang membangun teori politik jenis ini, menggunakan cara berpikir induktif. Dengan cara berpikir induktif, peneliti tidak memulai penelitiannya dengan teori. Sebaliknya, peneliti ini membangun dari pengamatan-pengamatan dan deskripsi dari pengamatan tersebut untuk membangun permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Konsep-konsep yang dipakai memang tidak diarahkan untuk membentuk sebuah hubungan sebab dan akibat. Keingintahuan peneliti dibangun secara bertingkat-tingkat ini sampai pada satu tahap ia menentukan kasus-kasus apa yang akan dijadikan fokus penelitian.

Jadi, berbeda dengan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini mendasarkan pada studi kasus (*case study*) baru setelah itu menentukan informan-informan kunci untuk mendapatkan data. Dari data dan pengamatan terlibat dan dalam kurun waktu yang ditetapkan peneliti, dibuatlah sebuah generalisasi atau teori yang khusus berlaku untuk kasus tersebut. Di sinilah letak perbedaan jenis teori yang dihasilkan. Teori jenis ini sering disebut juga sebagai *pattern of theories* yaitu, “sebuah pola di mana pemikiran-pemikiran saling menyambung sebagai sebuah kesatuan. *Pattern of theories* ini tidak menekankan cara berpikir deduktif dan hubungan antar konsep bukan hubungan yang bersifat sebab akibat....” (Neumann 1991, h. 38 sebagaimana dikutip oleh Cresswell 1994). Dengan perkataan lain, analisis data dari *case study research* dapat menghasilkan *pattern of theories* yang menghasilkan teori-teori yang generalisasinya terbatas pada kasus tersebut, bukan menghasilkan sebuah *grand theory*.

Biasanya teori jenis ini digunakan untuk mencari pola-pola teori politik yang ingin meneliti mengenai isu-isu politik yang baru seperti nasionalisme di daerah perbatasan, anggaran daerah yang berperspektifkan gender ataupun pemberantasan korupsi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan *good governance*.

Landman (2000) berpendapat bahwa studi kasus satu negara dapat berguna untuk menghasilkan sebuah hipotesis untuk teori-teori yang belum secara utuh terbentuk. Penelitian-penelitian ini dapat secara eksplisit dan implisit mengusulkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan hipotesis



untuk penelitian yang lebih besar sifatnya, seperti membandingkan beberapa negara. Penelitian O'Donnell (1973) tentang otoriterisme di Argentina – hubungan antara tahap khusus dari pembentukan kapitalis yang dependen dan munculnya negara otoriter birokratik - yang dijadikan hipotesis dan di tes dalam penelitian yang lebih besar untuk wilayah Amerika Latin (Collier 1979). Dengan begitu, hasil penelitian dari sebuah studi kasus dapat dijadikan untuk hipotesis dalam penelitian yang lebih besar oleh peneliti lain. Kalau hipotesis tersebut ditolak berarti perlu ada penelitian baru untuk mencari jawaban baru.

### **5. Peran Penelitian dan Kritik Akademisi dalam Pembentukan Teori**

Baik teori politik yang mengandung hubungan sebab akibat maupun yang tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk dikritik untuk kemudian dilengkapi ataupun untuk dinegasikan. Penelitian yang dilakukan O'Donnell yang kemudian dilanjutkan oleh Collier dan kawan-kawannya merupakan contoh yang tepat untuk memulai pembahasan tentang peran penelitian dan kritik akademisi dalam pembentukan teori.

Bagaimana penelitian-penelitian dan kritik akademisi berperan dalam pembentukan teori? Fenomena-fenomena politik baru bermunculan yang diterjemahkan ke dalam topik-topik dan masalah-masalah baru dalam ilmu politik. Menjadi kewajiban para peneliti untuk meneliti fenomena-fenomena politik baru tersebut. Hal yang menggembirakan dari munculnya fenomena-fenomena ini adalah menantang para ilmuwan politik untuk menjelaskan dengan teori-teori politik. Jika tidak dapat menjelaskan dengan teori-teori politik yang ada, maka kewajiban dari para ilmuwan politik inilah untuk mengembangkan teori-teori yang ada atau membentuk teori baru.

Beberapa fenomena politik baru dapat digambarkan dalam topik-topik berikut dan pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

No.	Topik-topik Baru	Pertanyaan-pertanyaan yang Muncul
1.	Pembangunan ekonomi dan demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah negara-negara kaya lebih demokratis? Kalau ya kenapa?</li> <li>2. Apakah pembangunan ekonomi menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan munculnya demokrasi?</li> <li>3. Sekali demokrasi sudah terbentuk, apakah <i>performance</i> ekonomi yang berkesinambungan membantu melonggarkan institusi-institusi demokratis?</li> </ol>
2.	Perbedaan pendapat yang <b>berakibat</b> kepada kekerasan politik ( <i>Violent political dissent</i> ) dan revolusi sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa masyarakat melakukan pemberontakan?</li> <li>2. Sektor mana dari masyarakat yang lebih cenderung untuk memberontak?</li> <li>3. Faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap suksesnya revolusi sosial?</li> </ol>
3.	Perbedaan pendapat yang <b>tidak berakibat</b> kepada kekerasan politik ( <i>Non-violent political dissent</i> ) dan gerakan-gerakan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa gerakan-gerakan sosial itu muncul?</li> <li>2. Bagaimana mereka berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka?</li> <li>3. Apakah yang mereka berusaha capai?</li> </ol>
4.	Transisi ke arah demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada objektif-objektif tertentu untuk pembentukan dan perawatan (<i>maintenance</i>) demokrasi?</li> <li>2. Siapakah agen-agen dari demokratisasi?</li> <li>3. Dengan referensi kepada gelombang ketiga demokrasi, mengapa beberapa negara yang tadinya otoriter mengalami transisi ke arah demokrasi?</li> <li>4. Faktor-faktor eksternal apa yang membantu mempromosikan transisi ke arah demokrasi?</li> </ol>
5.	Desain kelembagaan dan kinerja yang demokratis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan lembaga-lembaga eksekutif-legislatif</li> <li>2. Sistem elektoral</li> <li>3. Sistem partai politik yang berkaitan erat dengan sistem elektoral</li> </ol>

Sumber: Disarikan dari Landman (2000), bab 4 - bab 8

Selain penelitian-penelitian terhadap fenomena-fenomena politik baru memberikan sumbangan terhadap pembentukan teori politik, kritik-kritik sesama akademisi terhadap keakuratan data, formulasi dari hipotesis ataupun pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, generalisasi ataupun kesimpulan juga memberikan sumbangan penting terhadap pengembangan dan pembentukan teori baru.

Salah satu contoh teori yang banyak dikritik adalah teori sistem, struktur dan fungsi dari Gabriel Almond. Teori yang digagas Tahun 1966 sampai dengan buku *Comparative Politics Today: A World View* Tahun 1996 diterbitkan untuk edisi yang keenam, teori itu tetap bertahan bahkan dapat menjawab kritik-kritik yang dilontarkan terhadap teori tersebut.

Kritik utama yang dilontarkan terhadap teori sistem, struktur dan fungsi ini adalah (Almond dan Powell, Jr. 1996, h. 22):

- a. Teori ini statis dan konservatif di dalam metodologinya.
- b. Teori ini bias, selalu berpihak dalam status *quo* karena hanya mendeskripsikan seperangkat institusi pada waktu yang tertentu.

Menjawab kritik-kritik tersebut, Almond dan Powell, Jr. berargumentasi sebagai berikut. *Pertama*, alasan mengapa teori ini mengutamakan pendeskripsian dan perbandingan untuk menjelaskan institusi-institusi politik dan proses-prosesnya adalah secara tepat adalah sebagai usaha memahami institusi-institusi politik dan proses-proses di dalamnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, Almond dan Powell Jr. menggunakan teori ini untuk membandingkan mulai dari rezim Nazi Jerman hingga negara kesejahteraan Swedia.

*Kedua*, Almond dan Powell, Jr. pun mengakui bahwa teori ini harus dilengkapi dengan pendekatan pembangunan yang dinamis supaya dapat menjelaskan bukan saja *bagaimana* institusi-institusi politik berfungsi dengan baik tetapi juga harus dapat menjelaskan *mengapa* fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Almond dan Powell Jr. memberi contoh bahwa analisis struktur fungsi tidak dapat menjelaskan *mengapa* Jerman atau Perancis dapat berkembang seperti yang sekarang kita lihat. Perubahan-perubahan tersebut menginformasikan kepada kita apa saja yang berubah di rezim-rezim tersebut. Tetapi penjelasan *mengapa* mereka berubah harus dicari melalui konteks ekonomi, sosial, budaya dan internasional sehingga memperlihatkan analisis historis yang dinamis.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apakah perbedaan antara konsep dan variabel?
- 2) Formulasikan sebuah hipotesis yang berkaitan dengan konsep kebijakan publik dan representasi!
- 3) Jelaskan perbedaan antara deskripsi dan klasifikasi dalam rangka pembentukan teori politik!
- 4) Jelaskan bagaimana teori politik terbentuk dalam *non-causal empirical political theories*!
- 5) Jelaskan bagaimana kritik dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan teori politik!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Konsep menurut Miriam Budiardjo adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk “mengerti” dunia sekelilingnya. “Mengerti” itu hanya dapat dicapai melalui pikiran (*mind*) kita. Konsep adalah konstruksi mental, suatu ide yang abstrak, yang menunjuk pada beberapa phenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik, yang dimiliki oleh phenomena itu. Jadi, konsep adalah abstraksi dari atau mencerminkan persepsi-persepsi mengenai realitas. Atas dasar konsep atau seperangkat konsep dapat disusun atau dirumuskan generalisasi. Biasanya konsep dirumuskan dalam satu atau dua kata.” Berbeda dengan konsep, variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai karena itu dapat diukur. Sebagai contoh misalnya konsep partisipasi politik dan variabelnya adalah tingkat partisipasi politik.
- 2) Hipotesis antara kebijakan publik dan representasi ditimbulkan antara dua atau lebih variabel yang diturunkan dari teori; selanjutnya hipotesis ini di tes di lapangan. Hipotesis sering juga disebut jawaban sementara. Demokrasi dan representasi barulah merupakan konsep, belumlah berupa variabel. Oleh karena itu, haruslah konsep-konsep tersebut diturunkan menjadi variabel-variabel terlebih dahulu untuk kemudian ditentukan variabel mana yang akan menjadi variabel terikat dan mana yang menjadi variabel bebas.

Contoh hipotesisnya adalah:

Meningkatnya *prosentase* perempuan di parlemen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pembuatan kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kesejahteraan.

- 3) Deskripsi berarti menggambarkan dan memaparkan apa yang terjadi sehingga pembaca dapat membayangkan kejadian atau proses yang sedang diamati peneliti. Klasifikasi adalah satu tahap lebih tinggi dari deskripsi karena klasifikasi berarti membuat kategori-kategori dari data yang didapat melalui pendeskripsian. Pembentukan teori empiris yang konsep-konsepnya berhubungan tetapi bukan dalam hubungan sebab akibat (*non-causal empirical theories*) yang terbentuk secara induktif juga berkontribusi dalam pembentukan teori. Tahapan-tahapan seperti melakukan deskripsi dan klasifikasi juga dijalankan. Dua tahap lainnya seperti menguji hipotesis dan membuat prediksi tidak sepenuhnya dilakukan karena bukan tujuan dari teori jenis ini untuk melakukan kedua hal tersebut.
- 4) Peneliti yang membangun teori politik jenis ini, menggunakan cara berpikir induktif. Dengan cara berpikir induktif, peneliti tidak memulai penelitiannya dengan teori. Sebaliknya, peneliti ini membangun dari pengamatan-pengamatan dan deskripsi dari pengamatan tersebut untuk membangun permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Konsep-konsep yang dipakai memang tidak diarahkan untuk membentuk sebuah hubungan sebab dan akibat. Keingintahuan peneliti dibangun secara bertingkat-tingkat ini sampai pada satu tahap ia menentukan kasus-kasus apa yang akan dijadikan fokus penelitian. Jadi, berbeda dengan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini mendasarkan pada studi kasus (*case study*) baru setelah itu menentukan informan-informan kunci untuk mendapatkan data. Dari data dan pengamatan terlibat dan dalam kurun waktu yang ditetapkan peneliti, dibuatlah sebuah generalisasi atau teori yang khusus berlaku untuk kasus tersebut. Di sinilah letak perbedaan jenis teori yang dihasilkan. Teori jenis ini sering disebut juga sebagai *pattern of theories* yaitu, “sebuah pola di mana pemikiran-pemikiran saling menyambung sebagai sebuah kesatuan. *Pattern of theories* ini tidak menekankan cara berpikir deduktif dan hubungan antar konsep bukan hubungan yang bersifat sebab akibat.” Dengan perkataan lain, analisis data dari *case study research* dapat menghasilkan *pattern of theories* yang

menghasilkan teori-teori yang generalisasinya terbatas pada kasus tersebut, bukan menghasilkan sebuah *grand theory*.

- 5) Kritik-kritik sesama akademisi terhadap keakuratan data, formulasi dari hipotesis ataupun pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, generalisasi ataupun kesimpulan juga memberikan sumbangan penting terhadap pengembangan dan pembentukan teori baru.



## RANGKUMAN

---

- ✚ Dalam rangka memahami teori-teori politik mahasiswa perlu memahami atribut-atribut pembentuk teori-teori politik. Atribut-atribut itu seperti *konsep* dan *variabel hipotesis, inferensi*. Selain atribut-atribut tersebut mahasiswa juga perlu memahami *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* yang berkaitan erat terhadap pencarian data dalam rangka pembentukan teori.
- ✚ Pengenalan secara singkat mengenai konsep-konsep sangat penting bagi mahasiswa. Adapun konsep-konsep yang dibahas mencakup antara lain kekuasaan, otoritas, dan legitimasi, negara, kelas, elit, pilihan-pilihan rasional, modernisasi, pembangunan, ketergantungan, *civil society*, gerakan sosial baru, feminisme, transisi demokrasi, representasi dan demokrasi.
- ✚ Pembentukan teori empiris dengan konsep-konsep atau variabel-variabelnya yang berhubungan sebab akibat (*causal empirical theories*), terbentuk secara deduktif serta menggunakan metode kuantitatif.
- ✚ Pembentukan teori empiris yang konsep-konsepnya berhubungan tetapi bukan dalam hubungan sebab akibat (*non-causal empirical theories*), terbentuk secara induktif dengan menggunakan metode kualitatif.
- ✚ Peran penelitian dan kritik dari para ilmuwan politik juga mahasiswa sebagai calon akademisi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan dan pembentukan teori politik baru.

**TES FORMATIF 2**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hal yang membedakan konsep dari variabel adalah ....
  - A. konsep diformulasikan berdasarkan cara berpikir yang induktif, sedangkan variabel dibentuk berdasarkan cara berpikir yang deduktif
  - B. konsep merupakan abstraksi untuk dapat mengerti dunia, sedangkan variabel adalah konsep yang sudah diberi nilai sehingga dapat diukur di dalam sebuah hubungan sebab akibat
  - C. konsep terdiri dari dua kata, sedangkan variabel terdiri dari lebih dua kata
  - D. konsep mencerminkan karakteristik spesifik dari sebuah fenomena, sedangkan variabel mencerminkan keseluruhan sifat umum dari sebuah fenomena
  
- 2) Berikut ini bentuk hipotesis yang paling tepat adalah ....
  - A. Institusi-institusi demokratis dan pembangunan ekonomi
  - B. Pelembagaan partai politik berpengaruh terhadap sistem pengkaderan dalam partai politik.
  - C. Meningkatnya prosentase perempuan di parlemen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pembuatan kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kesejahteraan.
  - D. Faktor-faktor eksternal sebuah negara membantu dalam percepatan transisi demokrasi di negara tersebut.
  
- 3) Berikut ada beberapa pernyataan ....
  - a. Memformulasikan pertanyaan-pertanyaan penelitian dari pengamatan-pengamatan dan deskripsi,
  - b. Menentukan studi kasus,
  - c. Melakukan pencarian data dalam studi kasus,
  - d. Menarik abstraksi dari data yang dihasilkan dari studi kasus tersebut untuk menghasilkan *pattern of theories*
  - e. Memformulasikan permasalahan dan pertanyaan penelitian dari teori,
  - f. Merumuskan hipotesis dalam hubungan antara variabel-variabel
  - g. Men-tes hipotesis di lapangan dalam pencarian data
  - h. Menganalisis data dan melakukan verifikasi data dengan statistik
  - i. Membuat generalisasi dari data dengan mengaitkan lagi dengan teori

Dari pernyataan di atas, urutan tahap pembentukan *non-causal empirical theories* yang benar adalah ....

- A. a-b-c-d
  - B. e-f-g-h-i
  - C. e-b-c-h-i
  - D. e-f-g-b-c-d
- 4) Kritik dapat membantu pembentukan teori politik, sebab ....
- A. setiap teori mempunyai kelemahan
  - B. teori lama sering dianggap tidak *up date*
  - C. teori baru sering dianggap lebih baik
  - D. dianggap sesuatu yang progresif
- 5) Teori Sistem, Struktural dan Fungsional dari Gabriel Almond dapat dikategorikan sebagai *grand theory*, karena teori tersebut memiliki sifat ... yang dapat dipakai untuk menganalisis sistem politik mana pun.
- A. *complicated*
  - B. *parsimonous*
  - C. *condusive*
  - D. *comprehensive*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.



## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) B nilai.
- 2) C ideologi politik.
- 3) A deduktif.
- 4) D analisis terhadap institusi-institusi politik yang mendukung demokratisasi.
- 5) B sangat mudah untuk mengerti kapan dan dalam lingkungan apa yang dapat mentransformasi sebuah teori politik ataupun filsafat politik menjadi sebuah ideologi politik.

### *Tes Formatif 2*

- 1) B konsep merupakan abstraksi untuk dapat mengerti dunia, sedangkan variabel adalah konsep yang sudah diberi nilai sehingga dapat diukur di dalam sebuah hubungan sebab akibat.
- 2) C Meningkatnya prosentase perempuan di parlemen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pembuatan kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kesejahteraan.
- 3) A a-b-c-d.
- 4) A setiap teori mempunyai kelemahan.
- 5) B *parsimonous*.

## Daftar Pustaka

- Almond, G. & Powell, G.B. Jr. (1996). *Comparative Politics today: A world view*. 6<sup>th</sup> ed. New York: Harper Collins Publishers Inc.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu politik*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chilcote, R. (1981). *Theories of Comparative Politics: The search of Paradigm*. Colorado: West View Press.
- Craib, I. (1984). *Modern social theories: from Habermas to Parsons*, terj. S. Simamora (1986). Jakarta: CV Rajawali.
- Creswell, J.W. (1994). *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. 2nd ed. Sage Publications.
- Goodin, R.E dan Klingemann, H. eds. (1996). *A new Handbook of Political Science*. Oxford: Oxford University Press.
- Landman, T. (2000). *Issues and Methods in Comparative Politics: An introduction*. London, New York: Routledge.
- Macridis, R.C. (1983). *Contemporary Political Ideologies: movements and regimes*. Boston: Little, Brown and Company.
- Magnis-Suseno. (1987). *Etika politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rueschmeyer, D. et.al. (1992). *Capitalist Development dan Democracy*. Chicago: Chicago Press.